

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 9



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Radars Semarang	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah: BPK

Halaman 17 dan 23

## Besok Kasus Dana Kemah Dibuka

**KEBAYORAN BARU** - Polisi masih memeriksa sejumlah saksi atas kasus dugaan korupsi dana pelaksanaan Kemah dan Apel Pemuda Islam

Indonesia pada 2017. Rencananya, polisi kembali membuka kasus tersebut besok (22/4).

► Baca **Besok...** Hal 23

*Sambungan dari hal 17*

Polisi kembali memanggil ketua pelaksana kegiatan Ahmad Fanani serta Bendahara PP Pemuda Muhammadiyah Fuji Abdurrahman. "Insya Allah, pemanggilan kami lanjutkan Senin (22/4)," terang Kasubdit Tipikor Ditkrimsus Polda Metro Jaya AKBP Bhakti Suhendrawan. Menurut dia, kedua saksi seharusnya dipanggil sebelum

pelaksanaan pemilu. Namun, karena beberapa kali mangkir, pihaknya harus mengundur waktu pemanggilan berikutnya. "Mereka dijadwalkan diperiksa sebagai saksi pada 28 Februari. Tapi, mereka mangkir," terangnya.

Surat pemanggilan itu diberikan pada Senin (22/4). Pihaknya akan membagi dua waktu pemanggilan. Yakni, pemanggilan sebagai saksi kepada Fuji Abdur-

rahman dan berikutnya Ahmad Fanani. "Saksinya bendahara PP Muhammadiyah dulu yang kami panggil, Ahmad Fanani berikutnya," terang Bhakti.

Sebelumnya, Direskrimsus Polda Metro Jaya Kombespol Adi Deriyan menjelaskan, penetapan tersangka dalam kasus tersebut diumumkan setelah Pemilu. Hal itu mengindikasikan bahwa polisi telah mengantongi nama atas kasus

tersebut. "Kita tunggu setelah pemilu, ya," ucapnya singkat.

Sebagaimana diketahui, Kemah dan Apel Pemuda Islam Indonesia 2017 menggunakan dana APBN Kemenpora. Kegiatan tersebut melibatkan GP Ansor serta Pemuda Muhammadiyah. Polisi telah meningkatkan penyelidikan kasus itu ke tahap penyidikan dan menemukan kerugian negara.

Polisi belum mau mengungkap

jumlah kerugian negara. Polisi menjelaskan, penetapan tersangka dimunculkan setelah ada penghitungan kerugian negara. "Jadi, ketika penghitungan kerugian negara belum final, kami belum bisa menetapkan tersangka," terang Adi. Menurut dia, pihak kepolisian masih terus berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengetahui jumlah pasti kerugian negara. (bry/co5/ind)